

PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN SINTANG DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Yogi Prayugo Sugito
NPP. 29.1050

*Asdaf Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: yogiprayugos@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The high potential for flood disasters in Sintang Regency is seen from the occurrence of floods every year. This flood event usually occurs due to the rainy season with high rainfall. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and analyze how the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in flood disaster management in Sintang Regency, to describe and analyze the inhibiting factors of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in flood disaster management in Sintang Regency, and . **Method:** This study uses a qualitative approach and uses a descriptive method. This basic qualitative concept emphasizes that the most important element is the nature of the data obtained, namely scientific data presented in the form of explanations and descriptions in the form of information on the research.. **Result:** The findings obtained by the authors in this study that BPBD in flood disaster management in Sintang Regency has been going well, although there are still several inhibiting factors in flood disaster management in Sintang Regency. **Conclusion:** BPBD of Sintang Regency has played a good role in flood disaster management in Sintang Regency. This is evidenced by the good response from the community to the Sintang Regency BPBD. It is hoped that in the future BPBD of Sintang Regency can carry out better disaster management so that losses and flood victims can be handled properly. There are several inhibiting factors, namely the limited budget, limited human resources, and inadequate facilities and infrastructure. The efforts made by the BPBD of Sintang Regency to overcome the inhibiting factors are by submitting and proposing a budget, improving the quality of human resources, and submitting and proposing facilities and infrastructure that are still lacking.

Keywords: Flood, Role of Regional Disaster Management Agency, Flood Disaster Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya potensi bencana banjir di Kabupaten Sintang dilihat dari terjadinya bencana banjir setiap tahunnya. Kejadian banjir ini biasanya terjadi dikarenakan musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang, untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam

penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengatasi faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Konsep dasar kualitatif ini lebih menekankan bahwa unsur terpentingnya adalah sifat yang dimiliki oleh data yang diperoleh yaitu data ilmiah yang disajikan dalam bentuk penjelasan dan uraian dengan bentuk informasi atas penelitian tersebut. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa factor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang. **Kesimpulan:** BPBD Kabupaten Sintang sudah berperan dengan baik dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang. Hal ini dibuktikan dari respon dari masyarakat yang baik kepada BPBD Kabupaten Sintang. Harapan kedepannya BPBD Kabupaten Sintang dapat melakukan penanggulangan bencana lebih baik lagi agar kerugian dan korban banjir dapat ditangani dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang menghambat, yaitu terbatasnya anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana yang masih kurang. Upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Sintang untuk mengatasi faktor penghambat yaitu dengan cara, melakukan pengusulan dan pengajuan anggaran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengajukan dan mengusulkan sarana dan prasarana yang masih kurang.

Kata kunci: Banjir, Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Penanggulangan Bencana Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan terbesar yang ada di dunia, dan dilalui garis khatulistiwa serta geografis yang strategis dimana indonesia di antara dua benua yaitu Benua Asia dibagian utara dan Benua Australia di selatan. Walaupun terletak pada posisi yang strategis, terdapat banyak tantangan mengenai potensi bencana yang dapat mengancam Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah serangkaian peristiwa atau kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang menimbulkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan gangguan psikologis. Bencana-bencana yang terjadi di indonesia disebabkan oleh berbagai faktor penunjang terjadinya bencana, seperti faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia. Bencana terbagi menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Indonesia sendiri merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang melalui *website* <https://sintangkab.bps.go.id> Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang mempunyai luas sebesar 21.635 km² yang di dalamnya terdapat 14 kecamatan dan 391 desa serta 16 kelurahan. Sebagai daerah yang mayoritas hutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, kabupaten sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Curah hujan mencapai 249,08 milimeter selama sebulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari selama sebulan. Kabupaten sintang dilewati oleh sungai kapuas dan sungai melawi. Penyebab banjir yang paling utama di kabupaten sintang adalah intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung lama sehingga menyebabkan meluapnya sungai melawi dan sungai kapuas ke pemukiman warga, dan rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penanggulangan banjir di Kabupaten Sintang. Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

di Kabupaten Sintang, bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang terjadi hampir setiap tahun di hampir seluruh Kecamatan yang ada Di Kabupaten Sintang Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada *website* <https://BNPB.go.id>, pada bulan November tahun 2021 merupakan banjir yang menjadi banjir paling besar dan terlama yang pernah terjadi di kabupaten sintang sejak tahun 1963. Banjir tersebut dipengaruhi oleh hujan deras selama 5 hari secara terus menerus. Tinggi banjir yang disebabkan oleh hujan tersebut mencapai 1 sampai dengan 2 meter. Adapun jumlah korban yang terdampak banjir di keseluruhan 12 kecamatan 16 kelurahan dan 165 desa yang terdata Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang yaitu mencapai 35.117 kepala keluarga atau sekitar 140.468 orang terdampak banjir, serta 1.906 orang mengungsi ke tempat pengungsian yang telah disediakan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Banjir tersebut menelan korban jiwa yaitu 2 orang meninggal dunia di kecamatan tempunak dan kecamatan binjai. Kerugian sementara yang tercatat yaitu sebanyak 21.000 rumah terendam banjir, serta beberapa fasilitas umum. Adapun akibat dari bencana banjir tersebut, yaitu terputusnya akses jalan utama transportasi, lumpuhnya kegiatan masyarakat dan diliburkannya tempat sekolah dan beberapa kantor. Adapun akibat lain yang diakibatkan oleh banjir antara lain kekurangan makan dan air minum serta air bersih, sementara itu tempat pengungsian ditemukan kekurangan penerangan dikarenakan beberapa gardu listrik terendam banjir sehingga listriknya tidak dapat berfungsi. Adapun kendala pada saat melakukan penanggulangan bencana khususnya evakuasi pada tanggap darurat yaitu kondisi akses jalan yang sulit diakses karena jalan utama darat terendam banjir, maka proses evakuasi dilakukan menggunakan jalur air sehingga memerlukan waktu yang lama disertai sarana dan prasarana terbatas dan terbatasnya sumber daya manusia BPBD Kabupaten Sintang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir. Penelitian oleh Sugipto Beong, Erwin Resmawan, dan Rita Kalinggi yang berjudul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Samarinda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda lebih cenderung mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana, serta memastikan koordinasi dengan instansi lain, saling memantau daerah rawan bencana, dan mengembangkan Program Pemberdayaan Bencana. Sekolah Aman Bencana (SAB) dan Desa Tanggap Bencana (DESTANA) dimaksudkan untuk memitigasi dampak bencana dan menyampaikan informasi bencana. BPBD Kota Samarinda memasang poster/bahasa isyarat di Jalan Kota Samarinda, melakukan sosialisasi tingkat desa, dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan warga, bekerjasama dengan berbagai kalangan, antara lain Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI, serta anggota SKPD Pemerintah Kota Samarinda seperti Dinas Sosial, PUPR, BMKG, BLH, Bapeda, dan Dinas Kesehatan dan dinas yang terkait dengan kebencanaan, namun beberapa implementasi tersebut masih kurang pengendalian dan implementasinya. dalam program Desa Tahan Bencana (DESTANA) dan Sekolah Aman Bencana (SAB) sehingga tidak ada angka mitigasi bencana di kota Samarinda. Penelitian Henrika Riantika mengkaji peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan banjir di Desa Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Teknik yang digunakan adalah kualitatif (menjelaskan secara ilmiah keadaan sesuatu). Seperti yang ditunjukkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Enrekang yang

menerapkan prinsip-prinsip kebencanaan yang baik selama bencana banjir di Desa Lewaja Kabupaten Enrekang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tampil apik saat bencana banjir di Desa Lewaja Kabupaten Enrekang. manajemen, yaitu apakah penanggulangan bencana dilakukan secara tepat waktu dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai upaya penanggulangan bencana, keberadaan keadaan yang baik dengan organisasi atau lembaga penting bergantung pada kondisi yang bagus, dan penanggulangan bencana yang kooperatif dan bantuan menyatukan berbagai pemangku kepentingan secara seimbang. Penelitian Lorencia P. Barus menggali peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan banjir di Medan. BPBD Kota Medan didirikan pada tahun 2012 dan masih merupakan komponen yang relatif muda dari sistem pemerintahan Kota Medan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan wawancara mendalam dan teknik analitik kualitatif. Namun, BPBD Kota Medan memang memiliki peta rawan bencana khusus kota yang disusun, diresmikan, dan ditunjukkan kepada penduduknya secara utuh dan jelas untuk keperluan perkiraan bencana dan evakuasi

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sintang, selain itu cara penanganan penanggulangan bencana yang dilakukan pada penelitian ini adalah pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Pada teori peranan yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori peranan dari Soekanto (2012: 212) yang menyatakan bahwa aspek dinamis dimana kedudukan (srasus), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peranan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di kabupaten sintang. untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengatasi faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Konsep dasar kualitatif ini lebih menekankan bahwa unsur terpentingnya adalah sifat yang dimiliki oleh data yang diperoleh yaitu data ilmiah yang disajikan dalam bentuk penjelasan dan uraian dengan bentuk informasi atas penelitian tersebut. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2013:9) adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, dipergunakan untuk mendalami suatu keadaan objek yang bersifat alamiah. Penulis merupakan media utama, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kemudian difokuskan pada makna yang bersifat umum. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan BPBB Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Sintang. Adapun analisisnya menggunakan teknis analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246) yang menyatakan bahwa teknik analisis data terbagi menjadi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang. BPBD memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana yang tugasnya melakukan kegiatan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan suatu bencana, ada beberapa metode pelaksanaan dalam kegiatan penanggulangan bencana, yaitu tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Untuk menganalisis masalah ini penulis menggunakan teori peranan dari Soerjono Soekanto yang memiliki 2 dimensi yaitu Hak dan Kewajiban. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Hak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan peranannya tidak akan terlepas dari hak-hak yang harus diperoleh dalam menjalankannya tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana. Hak pada dasarnya merupakan suatu yang didapatkan setelah kewajiban dilaksanakan. Hak juga bisa diartikan sebagai kewenangan, kewenangan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku, hak itu sendiri memiliki beberapa indikator yaitu: ketersediaan anggaran, ketersediaan fasilitas, serta jumlah dan kualitas pegawai.

Berdasarkan konsep peranan menurut Soekanto, penulis mempunyai pendapat bahwa hak dalam suatu peranan merupakan komponen yang tidak bisa dilepaskan. Begitu juga dengan hak yang diperoleh BPBD kabupaten sintang selaku instansi yang membantu tugas dari kepala daerah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa pengertian hak yang dapat disimpulkan, diantaranya yang pertama yaitu segala sesuatu yang dapat diperoleh setelah melakukan suatu kewajiban dan yang kedua, hak bisa berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Setelah mengetahui pengertian mengenai hak, BPBD Kabupaten Sintang mempunyai beberapa hak dalam menjalankan peranannya. Adapun beberapa hak yang diperoleh BPBD kabupaten sintang adalah:

a. Anggaran

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang didukung oleh anggaran. Anggaran sangatlah penting dalam mendukung seluruh program penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, beliau mengatakan “anggaran merupakan hal yang sangat penting, suatu instansi atau badan tidak akan bisa membuat program-program sesuai tupoksinya yaitu pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana tentunya ini semua apabila ingin berjalan lancar haruslah didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi. Untuk BPBD Kabupaten Sintang, anggarannya bersumber dari APBD” dalam melaksanakan peranannya, suatu instansi atau badan memerlukan dana atau anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Alokasi anggaran tersebut mengacu dalam perencanaan program yang telah dibentuk oleh instansi atau badan yang bersangkutan. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sintang harus dapat merencanakan

program sesuai dengan visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi organisasi, sehingga perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan.

b. Sarana dan Prasarana

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sarana dan prasarana sangat penting bagi suatu instansi. Tanpa adanya sarana dan prasarana, pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang tentunya akan kesulitan. Maka dari itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan tercukupi sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses penanggulangan bencana. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Sintang rata-rata dalam kondisi baik dan dalam keadaan yang baik sehingga untuk kegiatan perkantoran tidak ada hambatan. BPBD Kabupaten Sintang memiliki 21 peralatan lapangan dengan rata-rata dalam kondisi baik, namun untuk keperluan masih jauh dalam kata tercukupi melihat dari kebutuhan BPBD Kabupaten Sintang dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam menanggulangi bencana terkhususnya bencana banjir besar tahun 2021 di Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, beliau mengungkapkan bahwa “selain anggaran, sarana dan prasarana juga berperan penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang. Setiap instansi pasti ada sarana dan prasarana, jika tidak ada maka bagaimana instansi tersebut bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kami, BPBD Kabupaten Sintang dapat dibbilang terbatas hingga kami kesulitan dalam menanggulangi banjir besar seperti tahun 2021, oleh karena itu kami bekerja sama dengan instansi lain seperti TNI/Polri pada saat tanggap darurat. Melihat dari keperluan BPBD Kabupaten Sintang dengan geografis yang luas dan kondisi geografis yang sulit tentu sarpras masih jauh dari kata cukup, untuk itu kami akan berupaya mengusulkan permohonan sarpras ke BNPB” dalam melaksanakan suatu peranan, BPBD Kabupaten Sintang haruslah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jika tidak mempunyai sarana dan prasarana, suatu instansi sulit untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena suatu instansi juga perlu ruangan, tempat untuk bekerja dan peralatan yang mendukung sesuai dengan kebutuhan instansinya. Apabila dilihat dari kebutuhan, tentu sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Sintang masih kurang.

c. Jumlah dan Kualitas Pegawai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya haruslah mempunyai personel, Adapun rincian pegawai di BPBD Kabupaten Sintang yaitu:

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil:

- a) Golongan I : -
- B) Golongan II : 7 Orang
- C) Golongan III : 15 Orang
- D) Golongan IV : 2 orang

2. Jumlah berdasarkan lulusan pendidikan:

- A) S2 : 3 Orang
- B) S1 : 13 Orang
- C) D3 : 1 Orang
- D) SLTA : 8 Orang

- E) SLTP : -
- f) Sd : -

3. Jumlah pegawai yang sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan (PIM):

- A) Spamen /PIM II : -
- B) Spama /PIM III : 2 Orang
- C) Adum /PIM IV : 2 Orang

4. Jumlah pejabat struktural atau eselon:

- A) Eselon II B : 1 Orang
- B) Eselon III.A : -
- C) Eselon III B : 3 Orang
- D) Eselon IV A : 9 orang

5. Pegawai Non PNS atau tenaga kontrak berjumlah 25 orang

Dari uraian keseluruhan mengenai data kepegawaian pada BPBD kabupaten sintang terlihat bahwa PNS dilingkungan BPBD Kabupaten Sintang didominasi oleh golongan III, dan mayoritas didominasi oleh tenaga kontrak atau non pns berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, kendala yang masih dialami oleh badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sintang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sumber daya manusia atau aparaturnya. Kurangnya personil terlatih pada bidangnya dalam suatu badan yang menangani tentang penanggulangan bencana sangatlah mempengaruhi dalam proses terciptanya suatu badan penanggulangan bencana yang kuat dan tangguh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pelaksana penanggulangan bencana daerah kabupaten sintang beliau mengungkapkan bahwa “untuk jumlah personel dan kualitas personel, BPBD Kabupaten Sintang juga mengalami keterbatasan, dapat dilihat bahwa di kantor ini kebanyakan non pns atau tenaga kontrak, dan masih banyak yang belum memahami dan menguasai bidangnya masing-masing” berdasarkan wawancara di atas, BPBD Kabupaten Sintang masih belum mempunyai tenaga personel yang mumpuni dalam menangani masalah bencana banjir. Dalam terciptanya kelancaran dalam penanggulangan suatu bencana, maka jumlah dan kualitas pegawai sangatlah penting selain dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai, keduanya harus saling memadai.

3.2. Kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang

Dari hasil penelitian yang bertempat di badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sintang terungkap bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Dimana peraturan Bupati yang merujuk pada pembentukan dari badan ini memuat mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dari badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sintang. Seluruh kewajiban tersebut dilaksanakan secara terkait untuk mencapai tujuan. Kewajiban badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sintang telah ditetapkan oleh peraturan daerah, adapun kewajiban yang harus dilakukan yaitu:

a. Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang dalam menjalankan kegiatan penanggulangan bencana, mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019, menjelaskan secara rinci bahwa dari ketentuan umum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, eselon hingga susunan tata kerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten sintang, beliau mengungkapkan bahwa “peraturan daerah ini merupakan landasan hukum akan adanya BPBD kabupaten sintang. Selain itu, peraturan ini pun menjadi acuan dalam perencanaan program. Dalam pembentukannya setiap instansi harus memiliki dasar hukum. Selain itu, peraturan daerah ini berfungsi sebagai dasar aturan” berdasarkan uraian dan hasil wawancara di atas, diperoleh kesimpulan bahwa peraturan daerah yang dibentuk sebagai landasan hukum bagi badan penanggulangan bencana daerah dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, peraturan daerah juga berfungsi sebagai instrument suatu aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai salah satu bentuk dari kewajibannya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pelaksana dari pemerintah daerah, yang mana pelaksana tugas dan penanggung jawab dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan berupa Sekretaris Daerah secara ex-officio dan secara administrasi oleh Kepala Pelaksana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang memiliki tugas pokok dan fungsi, adapun tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menetapkan sebuah pedoman mengenai penanganan bencana yaitu tahap pra bencana, saat bencana, dan sesudah bencana.
2. Menetapkan standar penyelenggaraan kebencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan peta rawan bencana kepada masyarakat;
4. Menetapkan prosedur tetap mengenai penanggulangan kebencanaan.
5. Melaporkan mengenai kegiatan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali saat pada kondisi normal dan pada saat kondisi darurat kebencanaan;
6. Mengontrol seluruh pengumpulan, penyaluran dana selama kebencanaan.
7. Mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran yang yang mana diperoleh dari APBD; dan
8. Menjalankan fungsi dan tugas kewajiban lain berdasarkan aturan undang-undang, serta
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menjalankan seluruh tugas berdasar kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan BNPB.

1. Kepala Pelaksana

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi badan, maka diangkat seorang kepala pelaksana. Kepala Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu Bupati pada penyelenggaraan penanggulangan suatu bencana. Kepala badan mempunyai fungsi yaitu:

1. Menyusun seluruh program mengenai penanggulangan bencana;
2. Menyelenggarakan pelaksanaan mengenai penanggulangan bencana;
3. Melaksanakan koordinasi mengenai penanggulangan bencana;
4. Melaksanakan administrasi mengenai tugas penanggulangan bencana;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan mengenai bencana; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk membantu kepala pelaksana dalam menjalankan tugas dalam penanggulangan kebencanaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengorganisir serta menetapkan seluruh program mengenai perencanaan dan perumusan kebijakan di BPBD.
2. Membina tata usaha, hukum, aturan perundang-undangan, peningkatan sumber daya manusia, keuangan organisasi, perlengkapan serta rumah tangga BPBD
3. Membina dan melakukan hubungan masyarakat dan protokol BPBD.
4. Menyelenggarakan seluruh tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
5. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan;
6. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD; dan
7. Melaksanakan dan menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam kegiatan pelaksanaan koordinasi dan menjalankan seluruh kebijakan yang sudah ditetapkan di bidang pencegahan, dan kesiapsiagaan Untuk menjalankan beberapa tugas tersebut, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi antara lain:

1. Merumuskan suatu kebijakan di bidang kesiapsiagaan bencana pada tahap pra bencana.
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga dalam kegiatan penanganan suatu bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
4. Memantau, menganalisis, dan mengevaluasi serta tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas dalam pengkoordinasian dan menjalankan seluruh kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat dan logistik. Adapun fungsinya antara lain:

1. Merumuskan suatu kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya suatu bencana, penanganan terhadap pengungsi, dan memberi dukungan logistik;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, dan penanganan dan dukungan berupa logistik;
3. Mengomandoi kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana;
4. Melaksanakan suatu hubungan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana;
5. Memantau dan mengevaluasi serta menganalisis pelaporan mengenai kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki tugas dan fungsi dalam rangka pengkoordinasian dan menjalankan suatu kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan suatu kebijakan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana;
3. Melaksanakan hubungan kerja penanggulangan bencana pada pasca bencana;
4. Memantau, mengevaluasi, dan menganalisis laporan mengenai pelaksanaan kebencanaan bidang pasca bencana; dan
5. Melaksanakan tugas lain dari pimpina sesuai dengan tugas dan fungsi.

Setelah mengetahui apa saja tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah, maka penulis akan membahas mengenai peranan yang dilakukan badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana banjir di kabupaten sintang dalam tahap pra bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.

1. Penanggulangan bencana banjir tahap pra bencana

Dalam penanggulangan bencana banjir di kabupaten sintang, BPBD kabupaten sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam tahap pra bencana atau sebelum bencana yaitu melakukan mitigasi bencana, yaitu mitigasi struktural dan non struktural. Dalam mitigasi struktural BPBD kabupaten sintang telah melakukan pembangunan dalam rangka sebagai pencegah bencana khususnya bencana banjir, seperti membuat saluran air, dan membuat ruangan terbuka hijau di desa-desa. Sedangkan penanggulangan dalam bentuk mitigasi non struktural, BPBD kabupaten sintang telah melakukan kegiatan sosialisasi, mengedukasi, mensosialisasi, mitigasi-mitigasi bencana alam dan non alam. Sosialisasi dilakukan melalui radio, media online, surat kabar, maupun ke satgas kecamatan dan desa.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, beliau mengungkapkan bahwa “BPBD kabupaten sintang dalam wujud pelaksanaan pra bencana yaitu melakukan mitigasi struktural dan non struktural, adapun mitigasi non struktural yaitu mengedukasi, mensosialisasikan bencana banjir, kampanye-kampanye tentang mitigasi-mitigasi bencana alam dan non alam. Sosialisasi dilakukan melalui radio, media online, surat kabar, dan ke satgas kecamatan dan desa. Untuk mitigasi struktural yaitu bersifat fisik, membangun bangunan antisipasi banjir, kami mempunyai sistem alat peringatan dini banjir dan membuat ruang terbuka hijau. Untuk anggaran ini masuk pada APBD, dan kami BPBD Kabupaten Sintang sebagai koordinator yang mengarahkannya” dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pra bencana yang dilakukan oleh BPBD kabupaten sintang telah dilaksanakan dengan dibuktikan dengan adanya sistem peringatan dini dan dibuatkannya ruang terbuka hijau, namun itu semua tentunya harus mendapat dukungan dari masyarakat.

2. Penanggulangan bencana banjir tahap tanggap darurat bencana

pelaksanaan tanggap darurat bencana, dalam tahap penanggulangan bencana banjir di kabupaten sintang, yaitu tahap tanggap darurat atau saat terjadinya dengan melakukan kegiatan tanggap darurat berupa evakuasi warga korban banjir, membangun tempat pengungsian, membangun dapur umum, distribusi sembako dan air bersih serta selalu menjamin ketersediaan stok kebutuhan pokok untuk korban banjir.

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil observasi penulis, dapat diketahui bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang mengalami banjir setiap tahun dalam kurun 2 tahun terakhir, untuk itu diperlukan penanggulangan bencana yang baik dari segi pencegahannya, saat bencana, dan setelah bencana. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sintang wajib menjalankan tugas dan fungsinya pada saat tanggap darurat berupa evakuasi korban bencana banjir serta memberikan bantuan logistik.

Bersasarkan wawancara yang dilakukan penulis bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, beliau menyatakan bahwa “banjir di Kabupaten Sintang merupakan banjir tahunan, kami hanya memiliki data lengkap mengenai banjir tahun 2020 dan 2021 saja dikarenakan data tahun sebelumnya tidak lengkap. Banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang pada tahun 2021, yang terjadi hampir selama satu bulan merupakan banjir terbesar selama 50 tahun terakhir sejak 1963. Banjir ini diakibatkan oleh curah hujan ekstrim, dan kerusakan lingkungan berupa kapasitas sungai yang berkurang. Kemarin ada kunjungan Menteri PUPR, Kemensos, Kepala BNPB, dan Bapak Ir. Joko Widodo dalam rangka meninjau banjir besar yang terjadi di Kabupaten Sintang. Alhamdulillah, setelah mendapat kunjungan dari para pejabat, pemerintah secepatnya setelah ini akan melakukan perbaikan yang signifikan baik itu dari pencegahan banjir di tempat daerah yang rusak seperti membangun bendungan, penanaman kembali di wilayah hutan gundul, dan perencanaan normalisasi sungai. Dalam bidang kedaruratan dan logistik sendiri, BPBD Kabupaten Sintang sendiri dalam melakukan tindakan evakuasi korban banjir di Kabupaten Sintang melibatkan anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk oleh BPBD kabupaten Sintang sendiri. Dalam mengevakuasi banjir yang terjadi, TRC bekerja sama bersama Basarnas, Damkar, maupun TNI/POLRI dalam melakukan evakuasi korban banjir. Dalam banjir besar yang terjadi kemarin sebanyak 123.936 jiwa terdampak. Evakuasi dilakukan menggunakan speedboat, perahu karet dan motor tambang. Untuk BPBD juga mendirikan tempat pengungsian sebanyak 105 tempat di 12 kecamatan dan dapur umum berjumlah 61 tempat yaitu berasal dari 32 pemda dan 29 swadaya masyarakat rata-rata menghasilkan nasi kota 1.463 perhari. Distribusi sembako berjumlah 12.443 paket. BPBD juga melakukan rapat koordinasi dengan agen distributor, Pertamina, Bulog, pedagang eceran agar tetap tersedianya stok kebutuhan pokok. Dalam tanggap darurat sendiri, hambatan kita terletak pada sarana dan prasarana, contohnya kami kesulitan membawa orang-orang ke pengungsian karena terbatasnya kendaraan pengangkut karena lokasi pengungsian dengan pemukiman terdampak banjir lumayan jauh mengingat geografis Kabupaten Sintang yang luas. Namun kami mendapat bantuan dari masyarakat dengan meminjamkan sampannya sebagai sarana transportasi dan evakuasi” berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses tanggap darurat, BPBD bekerjasama dengan TNI/Polri, Basarnas, dan Damkar. BPBD tidak dapat bekerja sendiri karena diperlukan koordinasi di lapangan secara bersama-sama. Banjir terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Sintang adalah banjir yang terjadi pada tahun 2021 di 12 kecamatan. Banjir tersebut terjadi selama kurang lebih satu bulan yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat baik itu dari sektor ekonomi, pemerintahan, dan yang lainnya menjadi lumpuh. Banyak fasilitas umum ditutup, dan kantor-kantor yang terdampak bencana banjir diliburkan.

3. Penanggulangan bencana banjir tahap pasca bencana

Setelah ditetapkan Surat Keputusan dari Transisi Darurat ke Pemulihan, maka dapat dilakukan pelaksanaan kegiatan pasca bencana. Adapun pelaksanaan pasca bencana yang dilakukan oleh BPBD dalam menanggulangi bencana banjir antara lain memperbaiki infrastruktur, sarana dan prasarana umum yang rusak akibat banjir, contohnya jembatan putus, jalan rusak permukiman warga yang rusak. berdasarkan wawancara bersama Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi, beliau mengungkapkan bahwa “dalam proses pasca bencana, kami BPBD Kabupaten Sintang terdiri dari Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Adapun pada bidang rehabilitasi, kami bekerja sama bersama instansi lain seperti Dinas Kesehatan, yaitu perbaikan infrastruktur yang rusak, kemarin tahun 2021 sementara sampai saat ini untuk perbaikan jembatan rusak, yang pertama yaitu jembatan gantung di desa Kremoi Kecamatan Ambalau, jembatan Gerambah

Sungai Ombak di Desa Tanjungtikam Kecamatan Ambalau, jembatan Desa Temakong Kecamatan Serawai, dan jembatan Sungai Pugunu Kecamatan Serawai, serta perbaikan beberapa rumah dan jalan yang rusak selama banjir di Kabupaten Sintang. Kami melakukan koordinasi juga bersama dinas PUPR dalam rangka perbaikan infrastuktur yang rusak. Ada sedikit hambatan dalam pasca bencana yaitu sama, disetiap bidang saya rasa yaitu masalah anggaran, kami tidak bisa bekerja secara optimal. BPBD juga bersama Dinas PUPR membangun geobag dan geotube sebagai penangkal banjir disepanjang sungai” melihat hasil wawancara di atas, BPBD telah melaksanakan pasca bencana akibat banjir di Kabupaten Sintang sesuai dengan dana anggaran yang ada, pelaksanaan pasca bencana bekerja sama dengan Dinas PUPR agar dapat lebih maksimal. Dinas PUPR memiliki peran penting dalam perbaikan infrastruktur dikarenakan lebih memahami masalah infastruktur sementara BPBD sebagai koordinator dilapangan.

c. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang

Visi dan Misi suatu perangkat daerah dibuat secara langsung maupun secara tidak langsung untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah, Visi BPBD Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 sama dengan visi yang di sampaikan Bupati yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung Penerapan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih 2021.

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang kurun waktu 2017-2021, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Misi 1, yaitu “Melaksanakan pembangunan serta pendidikan yang berkualitas yang berakar pada budaya lokal”
2. Misi 2, yaitu “Melaksanakan pembangunan Kesehatan yang menyeluruh adII dan terjangkau bagi masyarakat”
3. Misi 3, yaitu “Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah”
4. Misi 4, yaitu “Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial”
5. Misi 5, yaitu “Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”
6. Misi 6, yaitu “Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih”

Berdasarkan misi pembangunan daerah di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dalam lingkup penanggulangan bencana dalam 5 (lima) tahun (2017-2021), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang mengambil misi yaitu “Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih”. Dengan menetapkan tujuan “Terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat”. Dan sasarannya yaitu terselenggaranya penanggulangan bencana pada pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Respon dari masyarakat mengenai penanggulangan bencana dari tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, BPBD Kabupaten Sintang mendapatkan respon baik dari masyarakat.

Berdasarkan wawancara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sintang, beliau mengatakan bahwa “respon masyarakat mengenai penanggulangan bencana yang kami lakukan khususnya banjir kemarin, rata-rata masyarakat memberikan respon yang baik kepada kami dan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Walaupun kami merasa masih kurang dan ada hambatan, namun saya rasa mereka memakluminya” penulis kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat yang terdampak banjir untuk mendapatkan informasi mengenai peranan yang dilaksanakan BPBD dalam tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana sudah berjalan baik atau belum. Maka dari itu penulis mewawancarai 5 masyarakat yang terkena banjir di berbeda kecamatan yang terkena dampak banjir agar dapat mengetahui peranan BPBD secara menyeluruh.

Adapun informan pertama yaitu Ibu Siti di Kecamatan Sintang, beliau mengungkapkan bahwa “di tempat kami ini, memang sering banjir, karena tempat tinggal juga disebelah sungai kalau hujan deras bisa pasang banjir tetapi hanya beberapa hari saja sudah surut lagi apabila hujan ringan. Biasanya BPBD sama pemerintah sudah memberi isyarat ke kami untuk siap-siap menghadapi banjir, seperti peringatan dini, pemeritahuan media surat kabar tentang informasi hujan serta banjir. Untuk persiapan sebelum bencana ada, karena BPBD sudah sering mengirimkan pemberitahuan kalau mau banjir, saat evakuasi semua berjalan baik cuma peralatan seperti speedboad masih kurang. Setelah bencana, BPBD memperbaiki jembatan yang rusak”

Kemudian wawancara dengan salah satu masyarakat yang terdampak banjir yaitu dengan Bapak Warsidi di Kecamatan Sintang, beliau mengungkapkan bahwa “alhamdulillah disini pemerintah cepat bereaksi ketika terjadi banjir, semuanya sudah mempersiapkan tempat pengungsian untuk kami yang rumahnya terkena banjir sampai ke atap rumah, biasanya kami diinstruksikan ketempat pengungsian yang paling dekat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kekurangan hanya pada sarana saja karena sampan terbatas juga. Untuk info peringatan banjir disampaikan di radio, dan surat kabar jadi kami bisa mengantisipasi bencana banjir”

Respon dari masyarakat terdampak bencana banjir berikutnya adalah dari Ibu Marsiah di Kecamatan Kelam Permai, beliau mengungkapkan bahwa “biasanya ketika masuk musim penghujan yang lama akan terjadi banjir, banjirnya terjadi tiap tahunan, sebelum banjir kami udah diberi peringatan seperti mempersiapkan diri menghadapi banjir. Jadi saat terjadinya banjir kami langsung disuruh ke tempat pengungsian. Kami pasti tahu kalau disini banjirnya bagaimana, sampai sepahe orang dewasa. Jadi pemerintah sudah menyiapkan tempat untuk mengungsi dan di tempat itu juga kami diberi sembako seperti makanan, mie instan dan kebutuhan lainnya obat-obatan. Untuk kinerja pemerintah sudah baik, saya harap kedepan banjir di Kabupaten Sintang bisa berkurang”

Kemudian respon dari korban bencana banjir berikutnya adalah dari Ibu Evi di Kecamatan Sungai Tebelian, beliau mengungkapkan bahwa “Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Barat yang menjadi rawan banjir dikarenakan tempat pertemuan dua sungai ditambah drainase yang buruk, rumah saya kemarin tenggelam dan saya diungsikan ke posko BPBD dan saya mendapat pelayanan yang kurang baik, kami sedikit mendapatkan bantuan berupa air bersih sangat susah”

Selanjutnya wawancara terakhir bersama masyarakat terdampak bencana banjir berikutnya adalah dari Ibu Rosa di Kecamatan Sungai Tebelian, beliau mengungkapkan bahwa: “semua berperan baik dalam proses penanggulangan banjir pemerintah dan warga juga sama-sama bersatu, saling membantu menolong sesama, bantuan juga ada dari masyarakat yang mampu sehingga BPBD terbantuan dalam proses penanggulangan bencana banjir, namun BPBD masih lama dalam proses penjemputan evakuasi kami dari rumah sini”

Berdasarkan beberapa respon dari masyarakat yang terdampak banjir, ada beberapa masyarakat yang memberikan respon tidak baik tapi lebih banyak memberi tanggapan sudah baik. Hal ini dapat kita nilai bahwa BPBD Kabupaten Sintang telah melaksanakan peranannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum berjalan dengan maksimal, sehingga masih mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat.

d. Program Organisasi

Berdasarkan LKJ (Laporan Kinerja) BPBD yang merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BPBD Kabupaten Sintang menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2021 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja Perangkat Daerah yang mana terdapat urusan wajib yang harus dilaksanakan. Dalam urusan wajib ini dijabarkan lagi ke dalam 7 program dengan rincian 25 kegiatan. Dari 7 program tersebut terdapat 2 program dengan 9 kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan penanggulangan banjir di Kabupaten Sintang baik itu pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa ada 2 program dengan 9 kegiatan dalam LKJ Tahun 2021 yang sesuai dengan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang. Seluruh kegiatan yang telah ditetapkan telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang beliau mengungkapkan bahwa “BPBD Kabupaten Sintang terus berupaya untuk melaksanakan seluruh program kebencanaan yang ada, secara menyeluruh sudah baik dalam menjalankan peranannya, walaupun ada hambatan-hambatan. Kami melaksanakan semua kegiatan yang ada dalam menunjang dan memaksimalkan penanggulangan bencana yang baik, bagaimanapun keselamatan seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang utama” Berdasarkan wawancara di atas, menurut pendapat beliau, BPBD Kabupaten Sintang berupaya dengan maksimal dalam seluruh proses kegiatan penanggulangan bencana terkhususnya bencana banjir.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang sudah berjalan dengan baik walaupun masih belum maksimal dikarenakan beberapa informan dari masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir masih ada yang mengeluh. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan perannya dilapangan pasti akan mendapat permasalahan yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Meskipun begitu pelaksanaan pengurangan risiko dan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang harus tetap dijalankan meskipun memiliki beberapa kendala. Sebagai wujud untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak BPBD Kabupaten Sintang mengatasinya dengan berbagai upaya yang dilakukan seperti:

a. Melakukan Perencanaan dan Pengusulan Anggaran

Dalam mengatasi upaya kekurangan anggaran, BPBD haruslah berupaya agar dana tersebut dapat tercukupi untuk proses penanggulangan bencana agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Dalam penggunaan dana penanggulangan bencana, BPBD menggunakan sumber dana APBD baik itu dalam tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Untuk tahap tanggap

darurat bencana ada dana khusus berupa dana siap pakai di pusat atau BNPB. Sehingga untuk proses penanggulangan bencana banjir masih menggunakan seadanya. Upaya yang bisa dilakukan yaitu secara bertahap mengalokasikan anggaran dan mengusulkan ke BNPB, khususnya untuk penanganan bencana banjir.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan banjir tidak terlepas dari sumber daya manusia agar proses pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sintang, beliau mengungkapkan bahwa “kelemahan BPBD Kabupaten Sintang salah satunya yaitu kurangnya SDM yang mumpuni, maksudnya adalah tidak memiliki skill atau kemampuan sesuai dengan bidangnya dan masih di dominasi oleh tenaga kontrak untuk itu kami kedepan akan melakukan kegiatan rutin dan terstruktur berupa Pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan mutu SDM” untuk mengatasi kurangnya SDM BPBD Kabupaten Sintang melakukan upaya semaksimal mungkin melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas SDM baik itu dibidang pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana demi tercapainya penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang.

c. Mengajukan Usulan Sarana dan Prasarana

Dalam bidang sarana dan prasarana, BPBD Kabupaten Sintang masih ada kekurangan sehingga dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tidak maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, beliau mengungkapkan bahwa “dalam pemenuhan sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Sintang selain didukung dari APBD, BPBD dapat mengusulkan usulan sarana dan prasarana kepada BNPB. BNPB berkewajiban dalam memfasilitasi sarana dan prasarana BPBD yang masih kurang agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan optimal” BNPB berkewajiban dalam memfasilitasi sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Sintang yang mengalami kekurangan. Oleh karena itu, BPBD terus berupaya mengajukan sarana dan prasana yang dibutuhkan kepada BNPB.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pihak yang mempunyai peran dalam proses penanggulangan bencana khususnya bencana banjir, penulis mendapatkan beberapa faktor yang menjadi kendala bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang.

a. Terbatasnya Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian di lapangan oleh penulis, dapat diketahui bahwa untuk ketersediaan anggaran masih terdapat hambatan baik itu pada pelaksanaan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, penulis melakukan wawancara kepada ketiga Kepala Bidang yang memegang bidangnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, beliau mengungkapkan bahwa “dengan luas geografis yang luas dengan dana yang kurang. Masih banyak kurangnya. Dalam pra bencana menggunakan dana APBD namun, ditambah lagi dengan adanya covid tentu makin sulit. Upaya untuk mengatasinya harus bisa mensiasati agar mitigasi-mitigasi harus bisa tersampaikan ke kepala desa agar bisa menyampaikan ke warganya tentang kesiapsiagaan dan pencegahan bencana alam” dapat disimpulkan bahwa untuk anggaran sendiri, BPBD Kabupaten Sintang khususnya dalam bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sendiri belum dapat berjalan dengan maksimal karena terbatasnya anggaran ditambah lagi dengan refocussing untuk anggaran covid-19.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara Bersama Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten, beliau mengungkapkan bahwa “untuk bidang Tanggap Darurat mengalami kekurangan anggaran namun, penanggulangan banjir masih dapat diatasi. Apabila terjadi tanggap darurat kita mengambil Dana Siap Pakai di pusat dengan cara pengajuan setelah SK Tanggap Darurat dikeluarkan. Untuk banjir 2021 kemarin dananya masih bisa tercukupi” dapat disimpulkan bahwa untuk Bidang Tanggap Darurat dan Logistik, untuk Tanggap Darurat mengalami kendala dalam melaksanakan fungsinya karena kurangnya anggaran, namun tidak terlalu signifikan.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara berikutnya bersama Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi yang dilakukan, beliau mengungkapkan bahwa “untuk Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menggunakan dana seadanya saja, karena seperti yang kita ketahui sekarang masih susah, covid-19 masih ada sedangkan ditambah lagi bencana banjir besar seperti ini” untuk anggaran dana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk saat ini hanya dapat memperbaiki jembatan, untuk sarana prasana lainnya menggunakan dana seadanya, dikarenakan refocussing bencana non alam yaitu covid-19.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian di lapangan oleh penulis, dapat diketahui bahwa untuk jumlah personil pegawai yang dimiliki BPBD Kabupaten Sintang saat ini sudah mencukupi untuk kegiatan penanggulangan bencana dilapangan. namun saat tanggap darurat BPBD Kabupaten Sintang dinilai masih kekurangan dalam pengalokasian jumlah pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sintang, beliau mengungkapkan bahwa “untuk pra bencana yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan jumlah memang minim untuk itu, perlunya penambahan namun tidak terlalu signifikan. Yang paling utama yaitu meningkatkan kapasitas ketenagabencanaan di desa-desa yaitu relawan bencana karena dialah sebagai informator dan penggerak yang menginformasikan kondisi di desa. Untuk Tanggap Darurat dan Logistik khususnya bidang tangap darurat, jumlah personil TRC ada 12 laki-laki dibidang evakuasi, sisanya perempuan yang menangani bidang logistik. Untuk TRC masih kurang dalam menangani di 14 kecamatan. Namun bencana banjir yang terjadi tidak serentak, sehingga masih dapat dikendalikan. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi semua bahu membahu bekerja sama menangani bencana. Banjir tahun 2021 kemarin merupakan yang bencana yang besar. Personil terbantu semua karena ada bantuan dari luar yaitu BPBD dari Kabupaten Kapuas Hulu” selain itu rata-rata pegawai BPBD Kabupaten Sintang hanya memiliki keahlian yang sangat minim, hal ini disebabkan dari jenjang lulusan yang kebanyakan merupakan tamatan SLTP dan SLTA dimana keahlian mereka hanya terbatas sehingga masih perlu dibina dan dilatih serta didominasi oleh tenaga kontrak non pns.

c. Sarana dan Prasarana Yang Masih Kurang

Sumber daya lainnya yang tidak kalah penting yaitu sarana dan prasarana. Seperti hasil wawancara penulis kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, pada tanggal 11 Januari 2022, beliau mengungkapkan bahwa “untuk sarana dan prasarana, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan melibatkan seluruh pegawai yang ada di BPBD, dalam hal pra bencana kami melakukan sosialisasi dan menginformasikan bencana melalui surat kabar, radio, sehingga masih bisa dilakukan” dapat diketahui bahwa untuk bidang pencegahan dan kesiapsiagaan tidak ada hambatan dalam hal sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya, oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik, beliau mengungkapkan bahwa “untuk sarana dan prasarana kurang memadai dalam penanganan kedaruratan khususnya dibidang evakuasi bencana banjir. Sudah ada penambahan baru dengan cara pengajuan darurat, kemarin ada penambahan untuk banjir, namun tetap tidak cukup apabila menangani banjir besar seperti kemarin karena banyak sarana dan prasarana

yang masih kurang. Untuk penyaluran logistik tidak ada hambatan dan semua tersalurkan” menurut hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam melakukan tanggap darurat, BPBD Kabupaten Sintang masih kurang dalam penanggulangan bencana banjir untuk bencana banjir yang terjadi pada tahun 2021 kemarin merupakan bencana banjir yang paling besar yang pernah terjadi, sehingga tidak cukup dalam menangani masalah banjir yang besar seperti itu. Selanjutnya, penulis melakukan wawancara lagi bersama Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi, beliau mengungkapkan bahwa “sarpras sesuai dengan permohonan kita, misalnya ada speedboard, namun masih belum cukup, perlu tambahan. Hambatan masih banyak karena sarpras masih perlu ditambah karna masih banyak yang kurang. Sistem usulan mengusulkan ke Bupati dahulu, setelah di tanda tangan Bupati, ke Gubenur setelah itu ke BNPB, jadi tidak bisa langsung meminta ke BNPB” menurut hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Sintang dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi masih kurang dalam proses penanggulangan bencana banjir dalam sarana dan prasarana.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan banjir, namun belum berjalan dengan maksimal dikarenakan terdapat hambatan-hambatan dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang. Hal ini dibuktikan dari respon dari masyarakat yang baik kepada BPBD Kabupaten Sintang. Harapan kedepannya BPBD Kabupaten Sintang dapat melakukan penanggulangan bencana lebih baik lagi agar kerugian dan korban banjir dapat di kondisikan dengan baik. Faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Sintang masih terdapat beberapa faktor yang menghambat, yaitu terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana yang masih kurang. Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang untuk mengatasi faktor penghambat yaitu melakukan pengajuan dan pengusulan anggaran, peningkatan sumber daya manusia, dan mengajukan dan mengusulkan sarana dan prasarana yang masih kurang..

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kabupaten Sintang saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sintang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Barus, Lorencia P. “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan.” Universitas Sumatera Utara, 2013.

Beong, Sugipto, Erwin Resmawan, and Rita Kalinggi. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Dalam Penanggulangan Bencana Alam." *Ilmu Pemerintahan* 6, no. 4 (2018): 1–120.

Hasan, Erliana. *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2011.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, 1999.

Kodoatie, R. J, and Sugiyanto. *Banjir, Beberapa Penyebab Dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Kumar, Ranjit. *Research Methodology*. London: Sage Publication, 2010.

Muhari, Abdul. "Banjir Yang Melanda Warga Sintang Di Sepuluh Kecamatan Berangsur Surut." *Bnpb.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed April 4, 2022. <https://bnpb.go.id/berita/banjir-yang-melanda-warga-sintang-di-sepuluh-kecamatan-berangsur-surut->.

Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Nurjanah. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Peraturan Bupati Sintang Nomor 31. "Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Sintang." In *Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 31*, 2020.

Prayitno, Ujianto Singgih. *Telaah Konsep Penanggulangan Bencana Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.

Rahayu. *Banjir Dan Upaya Penanggulangannya*. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana, 2009.

Riantika, Henrika. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2021.

RPJMD. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*, 2021.

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta CV, 2010.

Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhardono, Edy. *Teori Peran, Konsep, Deviasi Dan Implikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.